


ILMU ADMINISTRASI NEGARA

A wide-angle photograph of a busy multi-lane highway in a city, with modern glass skyscrapers in the background. The image is overlaid with a white grid pattern and a large orange curved shape at the top. A white circular area at the bottom contains the authors' names.

Dr. Drs. M. Harry Mulya Zein, M.Si.
Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd.

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**Dr. Drs. M. Harry Mulya Zein, M.Si.
Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd.**

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Penulis:

**Dr. Drs. M. Harry Mulya Zein, M.Si.
Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd.**

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**
Tata Letak : **Lilis Khalisatul Karimah, S.H.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **vii, 124**
ISBN : **978-623-8385-15-7**
Terbit Pada : **Oktober 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Selamat datang dalam dunia ilmu administrasi negara. Buku ini hadir sebagai panduan yang komprehensif untuk memahami dasar-dasar dan konsep-konsep penting dalam administrasi negara. Administrasi negara memiliki peran yang krusial dalam membentuk, mengelola, dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat dan negara.

Ilmu administrasi negara tidak hanya menjadi landasan bagi para calon birokrat dan aparatur pemerintah, tetapi juga relevan bagi semua individu yang ingin memahami bagaimana pemerintahan berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat. Buku ini dirancang agar dapat diakses oleh berbagai latar belakang, sehingga siapapun, baik mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum, dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai administrasi negara.

Kami berharap buku ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan membantu Anda menjelajahi berbagai aspek administrasi negara, termasuk teori-teori dasar, proses-proses administratif, kebijakan publik, serta peran teknologi informasi dalam pemerintahan modern.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Kami berharap Anda dapat menikmati perjalanan Anda dalam memahami dunia yang menarik dan dinamis dari ilmu administrasi negara.

Selamat membaca!

PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan proyek ini. Dalam tangan-Nya, segala sesuatu dimungkinkan, dan atas izin-Nya, buku ini hadir di hadapan Anda.

Kami ingin mengawali prakata ini dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala berkah-Nya yang tiada hentinya. Semua yang baik dalam hidup ini adalah anugerah-Nya, dan kami merasa rendah hati atas kesempatan yang diberikan-Nya kepada kami untuk berkontribusi dalam dunia ilmu administrasi negara melalui buku ini.

Kami mempersembahkan buku ini kepada Anda, sebuah karya yang telah menjadi bagian integral dari perjalanan intelektual dan profesional saya dalam bidang ilmu administrasi negara. Buku ini bukanlah hasil karya tunggal, melainkan sebuah kolaborasi yang melibatkan banyak orang yang berdedikasi dalam menyampaikan pengetahuan yang berharga mengenai administrasi negara.

Dalam buku ini, Anda akan menemukan berbagai konsep dasar dan elemen-elemen penting yang membentuk dasar dari ilmu administrasi negara. Kami berusaha menyajikan materi ini dengan cara yang jelas dan komprehensif, sehingga siapapun, baik mahasiswa, praktisi pemerintahan, atau peminat ilmu administrasi, dapat memahaminya dengan mudah.

Isi buku ini mencakup berbagai topik, mulai dari sejarah dan perkembangan administrasi negara, hingga aspek-aspek penting seperti kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia, hingga peran teknologi informasi dalam pemerintahan modern. Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi panduan yang berguna dalam memahami kerumitan sistem administrasi negara.

Tentu saja, proyek ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kontribusi dari banyak pihak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, dosen, dan praktisi yang telah

memberikan wawasan, saran, dan pengalaman berharga mereka dalam pembuatan buku ini. Terima kasih juga kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, pembaca setia, yang telah memilih untuk menjelajahi dunia ilmu administrasi negara melalui buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memperkaya pemahaman Anda tentang administrasi negara.

Selamat membaca dan selamat mengejar pengetahuan baru!

Salam hormat,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 KONSEP ADMINISTRASI	1
A. Sejarah Perkembangan Ilmu Administrasi	1
B. Terminologi Administrasi.....	4
C. Konteks Administrasi.....	6
D. Pengertian Administrasi dan Ilmu Administrasi	9
E. Unsur-Unsur Administrasi.....	13
BAB 2 PERKEMBANGAN DAN KONSEP ILMU ADMINISTRASI NEGARA	18
A. Paradigma Ilmu Administrasi Negara.....	18
B. Definisi Ilmu Administrasi Negara.....	23
C. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara	25
D. Model Administrasi Negara.....	26
E. Landasan Praktik Administrasi Negara.....	30
F. Kedudukan Ilmu Administrasi Negara	34
G. Aspek Ilmu Administrasi Negara.....	36
H. Pokok-Pokok Administrasi Negara	40
I. Tingkatan-Tingkatan Administrasi Negara	43
J. Administrasi Negara Sebagai Staf Pemerintah	45
BAB 3 TEORI ADMINISTRASI NEGARA	48
A. Pendekatan Klasik dalam Administrasi Negara	48
B. Teori Birokrasi Max Weber	50
C. Teori Ilmiah Frederick Taylor.....	52
D. Hawthorne dan Human Relations.....	53
E. Teori Ilmu Perilaku	55
BAB 4 FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA	56
A. Fungsi Perencanaan.....	56
B. Fungsi Pengorganisasian.....	58

C. Kepemimpinan	59
D. Pengawasan	61
BAB 5 PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA	64
A. Masa Awal Administrasi Negara.....	64
B. Dikotomi Politik/Administrasi (1900-1926)	65
C. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937).....	67
D. Masa Penuh Tantangan (1938-1947)	68
E. Reaksi Pada Berbagai Tantangan (1947-1950)	70
F. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)	72
G. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) ...	73
H. Kekuatan Administrasi Negara Baru (1965-1970)	75
I. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970- sekarang).....	77
BAB 6 ETIKA DAN ETOS KERJA DALAM ADMINISTRASI NEGARA	80
A. Prinsip Etika Administrasi Negara	80
B. Etos Kerja dan Pelayanan Publik.....	83
BAB 7 TANTANGAN DAN INOVASI DALAM ADMINISTRASI	86
NEGARA	86
A. Tantangan-Tantangan Modern.....	86
B. Inovasi dalam Praktik Administrasi Negara	89
C. Teknologi Informasi Pemerintahan Modern	90
BAB 8 ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA.....	98
A. Sistem Administrasi Publik di Indonesia.....	98
B. Era <i>Good Governance</i>	101
C. Reformasi Birokrasi dan Desentralisasi.....	106
D. Otonomi Daerah, Partisipasi dan Efisiensi.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
GLOSARIUM	116
INDEKS.....	120
BIOGRAFI PENULIS.....	122

BAB 1

KONSEP ADMINISTRASI

A. Sejarah Perkembangan Ilmu Administrasi

Sejarah perkembangan ilmu administrasi adalah perjalanan panjang yang membawa kita dari zaman kuno hingga era modern. Awalnya, konsep administrasi dapat ditemukan dalam pemikiran para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, yang membahas organisasi pemerintahan kota-kota negara kuno. Namun, pengembangan ilmu administrasi yang lebih terstruktur dimulai pada abad ke-19 ketika negara-negara modern mulai muncul. Salah satu tonggak penting dalam sejarah ini adalah kontribusi Woodrow Wilson, seorang sarjana dan Presiden Amerika Serikat, yang pada tahun 1887 mengemukakan pemisahan antara politik dan administrasi.

Perkembangan ilmu administrasi semakin menguat di Eropa, terutama melalui karya Max Weber, seorang sosiolog Jerman. Weber merinci karakteristik birokrasi yang efisien dan efektif dalam teorinya. Pemikirannya tentang birokrasi menjadi salah satu konsep utama dalam ilmu administrasi. Di Indonesia, ilmu administrasi negara juga berkembang seiring dengan perubahan politik dan perkembangan pemerintahan. Soekarno, pendiri Indonesia, menggambarkan visinya tentang pembangunan ekonomi dan pemerintahan dalam karya-karyanya, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman administrasi negara di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, ilmu administrasi negara menghadapi tantangan baru. Administrators harus mengatasi kompleksitas masalah global yang mempengaruhi tugas-tugas pemerintah lokal. Ini mengharuskan disiplin ini untuk terus beradaptasi dan berkembang. Di era informasi, teknologi memainkan peran penting dalam administrasi negara dengan mendorong

e. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan adalah proses memilih antara berbagai alternatif tindakan berdasarkan informasi dan analisis yang ada. Dalam setiap tahap administrasi, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, pengambilan keputusan memiliki peran kunci. Keputusan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas organisasi, sementara keputusan yang salah dapat menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada analisis yang cermat, pertimbangan yang matang, dan partisipasi dari pihak-pihak yang relevan.

Dalam dunia administrasi, unsur-unsur kunci yang sering diangkat oleh para ahli meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan berperan sebagai landasan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sementara pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya dan struktur organisasi disusun dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan melibatkan pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Sementara itu, pengambilan keputusan menjadi inti dari setiap tahapan administrasi, di mana keputusan strategis diambil berdasarkan analisis mendalam untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Secara keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.

BAB 2

PERKEMBANGAN DAN KONSEP ILMU ADMINISTRASI NEGARA

A. Paradigma Ilmu Administrasi Negara

Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Dalam ilmu administrasi negara, terdapat beberapa paradigma yang telah berkembang seiring dengan perkembangan ilmu tersebut.

1. Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi

Paradigma dikotomi politik-administrasi adalah paradigma yang pertama kali muncul dalam ilmu administrasi negara. Paradigma ini memandang bahwa politik dan administrasi adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Politik adalah urusan pemerintah untuk menentukan kebijakan, sedangkan administrasi adalah urusan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Paradigma ini dipelopori oleh Woodrow Wilson dalam bukunya yang berjudul *The Study of Administration* (1887). Wilson berpendapat bahwa administrasi harus bersifat netral dan bebas dari pengaruh politik. Administrasi harus fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan kebijakan.

Keberadaan paradigma ini memberikan dasar yang jelas bagi pembagian peran dalam pemerintahan. Dengan adanya pemisahan antara politik dan administrasi, diharapkan pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan lebih efektif. Dengan demikian, politisi dapat fokus pada penetapan kebijakan,

BAB 3

TEORI ADMINISTRASI

NEGARA

A. Pendekatan Klasik dalam Administrasi Negara

Pendekatan klasik dalam administrasi negara adalah pendekatan yang berfokus pada rasionalitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan ini berkembang pada awal abad ke-20, dan ditandai dengan munculnya beberapa teori dan konsep penting, seperti teori birokrasi, teori organisasi, dan teori manajemen ilmiah. Ciri-ciri pendekatan klasik dalam administrasi negara antara lain:

1. Pendekatan ini berfokus pada rasionalitas dan efisiensi. Administrasi negara harus dikelola secara rasional dan efisien agar dapat mencapai tujuannya.
2. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi. Setiap pegawai harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga dapat bekerja secara efisien.
3. Pendekatan ini menekankan pentingnya hierarki dan disiplin. Struktur birokrasi harus disusun secara hierarkis, dan setiap pegawai harus tunduk pada disiplin yang berlaku.

Teori dan konsep penting dalam pendekatan klasik dalam administrasi negara antara lain:

1. Teori Birokrasi

Teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber pada awal abad ke-20. Teori ini menggambarkan administrasi negara sebagai birokrasi yang rasional, efisien, dan netral. Birokrasi klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Struktur hierarkis yang jelas
- b. Pembagian kerja yang tegas

E. Teori Ilmu Perilaku

Saat gerakan Human Relation muncul, banyak teori administrasi negara yang berkembang dalam lingkup ilmu perilaku. Selain dari Mayo, ada tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow, Chris Argyris, Douglas McGregor, Waren Benis, dan beberapa lainnya yang berkontribusi. Mereka membentuk sejumlah teori perilaku dalam administrasi negara dan memunculkan bidang studi baru, seperti Organizational Behaviour dan Organizational Development. Meski banyak teori di bidang administrasi negara, belum ada satu teori pun yang murni berasal dari disiplin tersebut. Sebagian besar teori tersebut diadopsi dari disiplin lain yang relevan dengan administrasi negara. Ada juga teori lain yang kerap digunakan dalam administrasi negara, misalnya teori sistem dengan konsep "Black Box"-nya.

BAB 4

FUNGSI ADMINISTRASI

NEGARA

A. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi administrasi negara yang paling mendasar. Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan dan sasaran serta menentukan cara untuk mencapainya. Perencanaan yang baik akan membantu pemerintah untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan tonggak utama dalam setiap proses administratif. Tanpa perencanaan yang baik, sebuah organisasi atau lembaga akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan memastikan bahwa sumber daya, baik itu waktu, tenaga, maupun materi, dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.

Dalam konteks negara, administrasi memainkan peran krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu fungsi utama dari administrasi negara adalah perencanaan. Perencanaan bukanlah sekadar serangkaian langkah atau kebijakan yang ditetapkan, tetapi lebih kepada sebuah visi yang diharapkan dapat mengarahkan sebuah negara menuju tujuan yang diinginkan.

Perencanaan di tingkat negara mencakup banyak aspek, mulai dari perencanaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan ekonomi. Setiap perencanaan ini memerlukan analisis mendalam, proyeksi, dan pertimbangan berbagai faktor untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

lembaga, serta keterlibatan dari pihak ketiga seperti akademisi, ahli industri, dan organisasi masyarakat sipil.

Penting untuk diingat bahwa pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Seiring dengan perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan teknologi, mekanisme pengawasan harus diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Ini memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah untuk investasi dalam pelatihan, teknologi, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan tetap menjadi prioritas utama dalam administrasi negara.

BAB 5

PERKEMBANGAN

ADMINISTRASI NEGARA

A. Masa Awal Administrasi Negara

Masa awal administrasi negara mengacu pada perkembangan administrasi pemerintahan dari zaman kuno hingga periode awal sejarah modern. Perkembangan administrasi negara ini berbeda-beda di berbagai negara dan wilayah, tetapi umumnya dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama. Berikut adalah beberapa ciri-ciri perkembangan administrasi negara pada masa awal:

1. Zaman Kuno:

- a. Pemerintahan pada zaman kuno seringkali terkait dengan kerajaan atau imperium, di mana seorang penguasa (raja atau kaisar) memiliki otoritas tertinggi.
- b. Administrasi negara pada zaman ini sering bersifat sentralistik, di mana keputusan dan kebijakan diambil oleh penguasa atau kelompok elit di sekitarnya.
- c. Struktur administratif yang sederhana dan belum terorganisasi dengan baik.

2. Zaman Klasik:

- a. Perkembangan negara Yunani kuno dan Romawi klasik memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan administrasi negara.
- b. Konsep-konsep seperti hukum, konstitusi, dan prinsip-prinsip administrasi muncul pada periode ini.
- c. Munculnya birokrasi sebagai sebuah sistem administrasi yang lebih terstruktur.

Periode setelah tahun 1970 adalah masa yang dinamis dalam perkembangan administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Perubahan dalam tuntutan masyarakat, teknologi, dan dinamika global terus memengaruhi praktik administrasi publik dan memaksa pemerintah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

BAB 6

ETIKA DAN ETOS KERJA DALAM ADMINISTRASI NEGARA

A. Prinsip Etika Administrasi Negara

Etika merupakan bagian dari filsafat yang menyoroti isu-isu moral dalam kehidupan manusia. Etika dibagi menjadi etika umum, yang menekankan prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua tindakan manusia, dan etika khusus, yang fokus pada kewajiban manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Di bawah etika khusus, terdapat pembagian antara etika individu dan etika sosial, dengan yang terakhir mencakup etika administrasi, termasuk etika administrasi negara.

Menurut Widodo (2001), etika administrasi negara memiliki dua interpretasi. Pertama, sebagai ilmu yang memfokuskan pada prinsip moral yang mendasari perilaku birokrat, khususnya dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, sebagai set nilai yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam organisasi. Sementara Kartasasmita (1997) melihat etika administrasi negara sebagai penghubung antara filsafat, nilai, dan moral dengan dunia administrasi, yang menggabungkan konsep administrasi dengan prinsip-prinsip etika.

Kumorotomo (1996) menjelaskan etika administrasi negara berhubungan dengan kompleksitas dan dilema yang dihadapi oleh administrator dalam pengelolaan organisasi publik. Ini mencakup integrasi norma moral dalam mengatasi dilema dan interaksi antara pejabat dengan negara dan masyarakat.

6. Kerjasama Tim: Bekerja dalam pemerintahan seringkali memerlukan kerjasama antar departemen dan unit. Oleh karena itu, kemampuan untuk bekerja sebagai tim dan kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama.
7. Respon Cepat: Dalam pelayanan publik, waktu adalah esensi. Respons cepat terhadap keluhan, pertanyaan, atau masalah yang dihadapi masyarakat menunjukkan dedikasi dan komitmen pemerintah terhadap warganya.
8. Keterbukaan dan Transparansi: Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan diambil dan dana publik digunakan. Transparansi dalam proses dan keputusan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
9. Penerimaan Masukan: Pemerintah harus terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Menerima dan mempertimbangkan masukan tersebut menunjukkan bahwa suara masyarakat dihargai dalam proses pengambilan keputusan.
10. Kontinuitas Pembelajaran: Dunia terus berubah, dan pegawai negeri harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ini berarti terus belajar dan mengembangkan diri untuk memenuhi tuntutan dan tantangan baru dalam pelayanan publik.

Menerapkan aspek-aspek tersebut dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga negara dipenuhi dengan cara yang efisien dan efektif.

BAB 7

TANTANGAN DAN INOVASI DALAM ADMINISTRASI NEGARA

A. Tantangan-Tantangan Modern

Administrasi negara adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era modern, administrasi negara menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi negara. Pemerintah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan global dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat global.

Globalisasi telah mendorong integrasi ekonomi antar negara. Hal ini menuntut administrasi negara untuk memahami dinamika ekonomi global dan merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan kepentingan global. Dengan semakin eratnya hubungan antarnegara, administrasi negara harus mampu menjalin kerjasama yang produktif dengan negara lain, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral, untuk mencapai tujuan bersama.

Arus migrasi global, baik permanen maupun sementara, menuntut administrasi negara untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai tenaga kerja asing dan perlindungan hak-hak mereka.

Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim menjadi perhatian global. Administrasi negara harus aktif berpartisipasi dalam upaya

menghambat adopsi layanan berbasis TIK oleh masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi pemerintah berbasis TIK.

BAB 8

ADMINISTRASI NEGARA

INDONESIA

A. Sistem Administrasi Publik di Indonesia

Administrasi publik di Indonesia memiliki sejarah dan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk warisan kolonial, budaya lokal, dan dinamika politik pasca-kemerdekaan. Sejak era reformasi pada akhir 1990-an, sistem administrasi publik Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan yang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

Struktur administrasi publik Indonesia terdiri dari tiga tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap tingkatan memiliki kewenangannya masing-masing sesuai dengan otonomi daerah yang diberlakukan sejak awal 2000-an. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam sistem administrasinya. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan, seperti penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, pembentukan komisi pemberantasan korupsi, dan penerapan sistem e-government di berbagai instansi pemerintah.

Tantangan dalam sistem administrasi publik Indonesia masih cukup banyak. Isu-isu seperti korupsi, inefisiensi, dan birokrasi yang berbelit-belit seringkali menjadi hambatan dalam pelayanan publik.

menjadi konsep yang saling berkaitan, tetapi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Sebuah daerah yang mampu mengintegrasikan ketiga konsep ini dengan baik akan memiliki daya saing yang kuat dan mampu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, partisipasi, dan efisiensi, diperlukan kebersamaan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta. Pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Masyarakat harus berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sedangkan swasta harus berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S., Sondang P. (2006). Kedudukan Ilmu Administrasi Negara Sebagai Ilmu yang Mandiri, Interdisipliner, dan Terapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(2): 21-29.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.
- Arifin, M. (2011). Kedudukan Ilmu Administrasi Negara Sebagai Ilmu yang Mandiri dan Interdisipliner. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2): 146-156.
- Atmosudirjo Prajudi.(2003). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Bovens, M., 't Hart, P., & Van Twist, M. J. (2008). Organized irresponsibility: On the accountability of regulatory agencies. *West European Politics*, 31(5), 889-905.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. John Wiley & Sons.
- Bryson, John M., and Barbara C. Crosby. (2011). *Leadership for the Common Good: Tackling Public Problems in a Shared-Power World*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cedric Ryngaert and J. Wouters.(2005). *Good Governance lesson from International Organization*, First Edition. New York: Wessel
- Christensen, T., Lægreid, P., & Wise, L. R. (2017). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.
- Cohen, E. S. (2008). *Defense and the National Interest: The Past and Future of Defense Economics*. Brookings Institution Press.
- Daft, R. L. (2018). *Management*. Cengage Learning.
- Dessler, G. (2017). *Management: Principles and Practices for Tomorrow's Leaders*. Pearson.

- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467-494.
- Dye, T. R. (2001). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Ferlie, E., Lynn Jr, L. E., & Pollitt, C. (2005). *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford
- Francis N. Botchway.2000. Good Governance: The Old, The New, The Principle, and The Elements. *Florida Journal of International Law* 13(1)
- Frans von Magnis.(1975). *Etika Umum Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, cet.1*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius
- Frederickson, H. G., & Smith, K. B. (2003). *The Public Administration Theory Primer*. Westview Press.
- Goodnow, F. J. (1981). *Politics and Administration: A Study in Government*. Transaction Publishers.
- Gordon, G. J. (2017). *Public Administration: A Disciplinary Assessment*. Routledge.
- Handyaningrat, Soewarno. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heath, R. L., & Palenchar, M. J. (2009). *Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challenges*. Sage Publications.
- Henk. Addink. (2008). *Principle of Good Governance: lesson from Administrative Law, First Edition*. Netherlands: Utrecht University
- Henry, Nicholas. (1980). *Public Administration and Public Affairs: An Introduction to Government*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- JJ.H. Bruink.(1999). *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arif Sidharta. Bandung: Citra Adhitya Bhakti
- Kartasmita, Koesnadi. (1997). *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.

- Kholil, M.F., and M.H., Arifin. (2013). "Kedudukan Ilmu Administrasi Negara Sebagai Ilmu yang Mandiri, Terapan, dan Interdisipliner". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1): 1-13.
- Koontz, H., & Weihrich, H. (2016). *Essentials of Management*. McGraw-Hill Education.
- Kumorotomo, Wahyudi. (1996). *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lynn, L. E., & Heinrich, C. J. (2013). *Governance in Dark Times: Practical Philosophy for Public Service*. Georgetown University Press.
- Marini, Frank. (1971). *The Politics of Administration: Organization, Processes, and Reform*. Chicago: Rand McNally.
- MD, Mohammad Mahfud. (2001). *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan yang Bersih*, cet. 2. Yogyakarta: UII Press
- Meier, K. J., Brudney, J. L., & Bohte, J. (2009). *Applied Statistics for Public and Nonprofit Administration*. Wadsworth Publishing.
- Mintzberg, H. (2013). *Simply Managing: What Managers Do—and Can Do Better*. Berrett-Koehler Publishers.
- Moon, M. J. (2002). The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424-433.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Nalbandian, J. (2014). The Decentralization-Local Governance Nexus: Theory and Evidence from the Developing World and Beyond. *Public Administration Review*, 74(2), 267-280.
- Ngaire Woods. (1999). *Good Governance in International Organization*. EBSCOhost: Global Governance Vol. Five
- Niskanen, W. A. (1971). *Bureaucracy and Representative Government*. Aldine-Atherton.
- Osborne, David, dan Ted Gaebler. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Osborne, S. P., & Brown, K. (2005). *Managing Change and Innovation in Public Service Organizations*. Routledge.

- Ostrom, V. (1973). *The Intellectual Crisis in American Public Administration*. University of Alabama Press.
- O'Toole, Laurence J., Jr. (1997). *Administrative Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Perry, J. L., & Christensen, R. K. (2001). The Foundations of Public Administration: A Century of Professionalism and Civil Service Reform. *Public Administration Review*, 61(4), 415-426.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public Management Reform: A Comparative Analysis—New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State*. Oxford University Press.
- Public Administration: Concepts and Cases" oleh Richard Stillman, "Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector" oleh David H. Rosenbloom,
- Rainey, H. G., & Rainey, L. H. (2014). *Understanding and Managing Public Organizations*. John Wiley & Sons.
- Riggs, F. W. (2004). *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Transaction Publishers.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2019). *Management*. Pearson.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2019). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Administrasi Negara: Reformasi dan Modernisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sitindjak, V. (2017). Konsep Reformasi Birokrasi. *Jurnal Inspirasi*, 8(2), 79-89.
- Stillman, R. J. (2018). *Public Administration: Concepts and Cases*. Cengage Learning.
- Sutarto, Budi. (2016). *Administrasi Pemerintahan: Konsep, Teori, dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem administrasti Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, BumiAksara
- The, Liang Gie. (2009). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.

- Thoha. (2003). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta : Perasosialisasi Pelayanan Prima. Lembaga Adminstrasi Negara republik Indonesia.
- Toha, Miftah. (1999). *Transparansi dan Pertanggung Jawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah*. Makalah disampaikan pada seminar hukum nasional ke-7, Jakarta
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: UNDP.
- Waldo, Dwight. (1955). *The Study of Public Administration*. New York: Random House.
- Wamsley, G. L. (1997). *Modern Public Administration: Current Trends and Future Prospects*. Longman.
- Wibisono, Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja: Konsep, Aplikasi dan Pengembangan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: CV Cutra Media.

GLOSARIUM

A

Akuntabel = 1. harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; 2. bertanggung jawab; dapat dipahami.

Akuntabilitas = 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; 3. pertanggung jawaban; 4. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B

Birokrasi = cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan, yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

D

Decision Making= orang atau sekelompok individu yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting yang strategis berdasarkan sejumlah variabel, termasuk batasan waktu, sumber daya yang tersedia, jumlah dan jenis informasi yang tersedia, serta jumlah pemangku kepentingan yang terlibat.

Digitalisasi = penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan memberikan pendapatan baru serta peluang menghasilkan nilai; ini adalah proses perpindahan ke bisnis digital.

Dikotomi Politik= pembagian dua kelompok yang saling bertentangan dan sulit diintegrasikann.

E

Efektif = Mengacu pada pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan. Suatu tindakan atau metode dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, meskipun mungkin memerlukan sumber daya yang lebih banyak.

Efisien = Berkaitan dengan pencapaian hasil dengan konsumsi sumber daya yang minimal. Efisiensi menekankan pada optimalisasi penggunaan sumber daya (seperti waktu, tenaga, atau biaya) untuk mendapatkan hasil maksimal.

Eksekutif = Mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasi sehari-hari dari suatu organisasi atau perusahaan. Dalam konteks korporasi, eksekutif seringkali adalah manajer senior atau pemimpin perusahaan.

Esensial = Sesuatu yang sangat penting atau mendasar. Dalam berbagai konteks, esensial dapat merujuk pada sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan suatu proses atau fungsi.

G

Globalisasi = Proses integrasi dan interaksi antar negara-negara di dunia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Globalisasi sering kali dihubungkan dengan penyebaran informasi, barang, dan jasa lintas batas negara.

Good Governance= Suatu konsep yang mengacu pada cara pemerintahan atau organisasi dikelola dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Good governance menekankan tata kelola yang baik, adil, dan bertanggung jawab.

I

Inklusivitas = Prinsip atau praktik memasukkan semua orang tanpa diskriminasi, terutama mereka yang terpinggirkan atau kurang

beruntung. Inklusivitas menekankan penerimaan dan pengakuan atas keragaman.

Integritas = Kualitas seseorang atau suatu organisasi yang memiliki prinsip moral yang kuat, kejujuran, dan etika. Orang atau entitas dengan integritas konsisten dalam tindakan dan kata-katanya, serta dihormati karena kejujurannya.

K

Konstitusional= Berkaitan dengan konstitusi atau hukum dasar suatu negara. Suatu tindakan atau keputusan dianggap konstitusional jika sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi.

Konstruktif = Sesuatu yang memberikan sumbangan positif atau membangun. Dalam konteks kritik, konstruktif berarti memberikan masukan yang bertujuan untuk perbaikan, bukan hanya menunjukkan kesalahan.

Konteks = Latar belakang, situasi, atau kondisi di mana suatu peristiwa terjadi atau suatu pernyataan dibuat. Konteks membantu memahami makna atau pentingnya sesuatu dalam suatu situasi tertentu.

L

Lembaga Legislatif= Sebuah organisasi atau badan yang memiliki wewenang untuk membuat, mengubah, atau mengesahkan undang-undang. Dalam banyak sistem pemerintahan, lembaga legislatif bisa berupa parlemen, kongres, atau majelis.

M

Migrasi Global = Pergerakan orang-orang lintas batas negara, baik untuk sementara atau permanen. Migrasi global bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk alasan ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan.

R

Rasionalitas = Kemampuan untuk berpikir dan bertindak berdasarkan logika, alasan, dan fakta. Rasionalitas sering kali berlawanan dengan emosi atau tindakan impulsif.

Regulasi = Aturan atau ketentuan yang dibuat oleh otoritas tertentu (seperti pemerintah) untuk mengatur atau mengendalikan perilaku dalam masyarakat atau industri tertentu.

Responsif = Kemampuan untuk bereaksi cepat dan secara tepat terhadap situasi atau permintaan. Dalam konteks pelayanan, organisasi atau individu yang responsif cepat menanggapi kebutuhan atau masalah yang muncul.

S

Supremasi Hukum = Prinsip bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara dan semua individu atau entitas, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Ini menekankan bahwa keputusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan atas kehendak individu atau kelompok.

T

Terminologi = Kumpulan istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam suatu bidang atau disiplin ilmu. Terminologi membantu memahami dan berkomunikasi dengan tepat dalam konteks tertentu.

Transparansi = Keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik atau pemangku kepentingan. Organisasi atau individu yang transparan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh orang lain.

Y

Yudikatif = Berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam banyak sistem hukum, yudikatif adalah salah satu dari tiga cabang pemerintahan (bersama dengan eksekutif dan legislatif) yang bertanggung jawab atas interpretasi dan penerapan hukum.

INDEKS

A

Administrasi, iii, vi, vii, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 92, 93, 94, 96, 105, 106, 107, 108
Administrasi Negara, vii, 3, 6, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 34, 37, 40, 42, 46, 60, 62, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 83, 92, 93, 96, 105, 106, 108
Anggaran, 38, 39, 113

E

Efisiensi, vii, 43, 63, 70, 101, 102, 103
Evaluasi, 12, 36, 38, 40, 54, 63

G

Good Governance, vii, 21, 26, 95, 105, 106, 107, 109

I

Indonesia, vii, 1, 3, 4, 30, 84, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 105, 108

K

Kebijakan, vii, 38, 42, 43, 65, 68, 70, 72, 73, 83, 84, 90

M

Masyarakat, 24, 38, 39, 42, 44, 54, 57, 71, 77, 79, 80, 82, 83, 89, 99, 100, 101, 103

N

Negara, vi, vii, 30, 39, 45, 54, 62, 66, 68, 73, 92, 93, 94, 98, 105, 106, 108

O

Organisasi, 5, 51, 65, 66, 84, 108

P

Pelaksanaan, 7, 8, 13, 43

Pembangunan, 7, 40, 44, 67, 94

Pemerintah, vi, 4, 23, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71,
72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 99, 100, 104,
108

Pengawasan, vii, 7, 13, 15, 16, 58, 59, 63

Pengorganisasian, vi, vii, 13, 15, 55

Perencanaan, vi, 8, 13, 15, 16, 53, 54, 70

Publik, vii, 18, 19, 38, 43, 44, 64, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 92, 106, 108

S

Sistem, vii, 61, 92, 93, 108, 117

T

Tata Kelola, 39

BIOGRAFI PENULIS



Dr.Drs.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si.

Penulis lahir di Pandeglang pada tanggal 19 Juli 1960. Ia memulai perjalanan pendidikannya di Pandeglang, dari SD hingga SMA. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia untuk program studi Administrasi Negara (S1) dan Ilmu Administrasi (S2). Harry kemudian meraih gelar doktoral di bidang Ilmu

Pemerintahan dari Universitas Padjajaran.

Sepanjang karirnya, Dr. Harry Mulya Zein telah menduduki berbagai posisi penting. Di awal kariernya, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program pada tahun 1994, lalu meraih posisi sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada tahun 1996. Beliau terus menanjak dengan menjadi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada tahun 1997, Camat Cipondoh pada tahun 1998, dan Asisten Administrasi Pemerintahan-SETDA pada tahun 2001. Tidak berhenti di situ, Dr. Harry juga pernah menjabat sebagai Asisten Pengendalian Pembangunan-SETDA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2002, Sekda Kota Tangerang pada tahun 2004, Kepala Sekretariat KASN pada tahun 2015, dan Asisten Komisioner pada tahun 20019. Hingga saat ini, beliau aktif sebagai dosen di IPDN sejak tahun 2015.

Dalam dunia penulisan, Dr. Harry Mulya Zein telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan buku. Beberapa judul yang menonjol di antaranya adalah "Ziarah Budaya Kota Tangerang: Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah", "Kultur Birokrasi Menebar Kepentingan Warga", dan "Reformasi Birokrasi: Belajar dari

Daerah". Selain itu, beliau juga banyak berkarya dengan menulis artikel ilmiah.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kaya, Dr. Harry Mulya Zein tampil sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Karyanya mencerminkan pemikiran mendalam dan komitmen yang kuat untuk memajukan negeri.

Email Penulis: hmz1960@gmail.com



Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd.

Penulis lahir di Kabupaten Purwakarta. Pertama kali penulis mengenyam Pendidikan di TK sampai dengan SMA di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan Bandung dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan S2 pada Prodi Administrasi Pendidikan dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan Makro di Universitas Islam Nusantara Bandung.

Penulis sekarang berstatus sebagai mahasiswa S3 pada Prodi Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Penulis memulai terjun dalam dunia Pendidikan dengan menjadi guru di Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2010 di SMPN 3 Purwakarta sampai dengan tahun 2019. Mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di PTS di STIE Wibawa Karta Raharja Purwakarta. Penulis aktif pada penulisan buku, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Penulis aktif di beberapa organisasi seperti Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia, Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia. Penulis juga aktif sebagai editorial team dan reviewer pada jurnal nasional.

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Buku ini memulai pembahasan dengan konsep dasar administrasi di Bab 1, menelusuri jejak sejarah perkembangan ilmu administrasi, mengklarifikasi terminologi, dan mendefinisikan perbedaan antara administrasi dengan ilmu administrasi, serta mengeksplor unsur-unsur yang melandasi administrasi. Dalam Bab 2, fokus beralih pada perkembangan dan konsep ilmu administrasi negara, membahas berbagai paradigma, definisi, dan prinsip-prinsip dasar. Pembaca akan diperkenalkan dengan model, landasan, kedudukan, dan aspek-aspek khusus dari ilmu administrasi negara, termasuk tingkatan dan peranannya dalam struktur pemerintahan. Bab 3 menyoroti teori-teori penting dalam administrasi negara, seperti pendekatan klasik, Teori Birokrasi Max Weber, dan Teori Ilmiah Frederick Taylor, serta memberikan gambaran tentang bagaimana human relations dan ilmu perilaku mempengaruhi bidang ini. Bab 4 mendalami fungsi-fungsi kunci administrasi negara, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, hingga pengawasan, memberikan gambaran tentang bagaimana administrasi negara berfungsi dan beroperasi. Sejarah panjang administrasi negara diungkap di Bab 5, mengajak pembaca melalui evolusi bidang ini dari masa awal hingga kontemporer, termasuk berbagai tantangan dan reaksi terhadap tantangan tersebut. Etika dan profesionalisme menjadi pusat perhatian di Bab 6, dengan diskusi mendalam tentang prinsip-prinsip etika dalam administrasi negara dan pentingnya etos kerja yang baik dalam pelayanan publik. Bab 7 membahas tantangan-tantangan modern yang dihadapi oleh administrasi negara dan bagaimana inovasi, terutama dalam teknologi informasi, berperan dalam menghadapinya. Terakhir, Bab 8 mengkhususkan pada administrasi negara Indonesia, membahas sistem administrasi publik di negara tersebut, era *good governance*, reformasi birokrasi, desentralisasi, serta dinamika otonomi daerah dan efisiensi. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan komprehensif tentang ilmu administrasi negara, dari teori dasarnya hingga penerapannya dalam konteks nyata.